



Analisis Kelemahan Rezim European Union Emission Trading Scheme dalam Menghadapi Carousel Fraud pada Tahun 2010 – 2015

Muhammad Faris Hersanda Wibowo

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

European Union Emission Trading Scheme as the world largest carbon trading regime, has launched in 2005. From 2005 until now EU ETS has been pass three phase, which every period has a significant change on EU ETS regime. Carousel fraud is one of fraud which harms European union member states, in EU ETS carousel fraud is make EU country loss their GDP until 5 billion euro in 2011. EU ETS regime is struggling to counter this fraud, in order to secure their member states from carousel fraud in the future EU ETS through European Commission recommend anti-fraud mechanism which every country should implement. But not all states comply with the recommendation from European Commission. This research is struggling to find out why not all EU ETS member states comply with European Commission recommendation. For the record, EU ETS is “classic” fraud which also happens in many Europe commodity market. This research purpose is to find out why there is no consensus among EU member states. This research uses qualitative research method with international regime theory and compliance theory to analyze regime and states behavior. According to the result of this research, national interest is the main reason why states not meet the consensus, non-states actor also playing significant rules in EU ETS and them also responsible for carousel fraud which happens in EU ETS.

Keywords : carousel fraud, non-compliance , national interest , sub-national actor

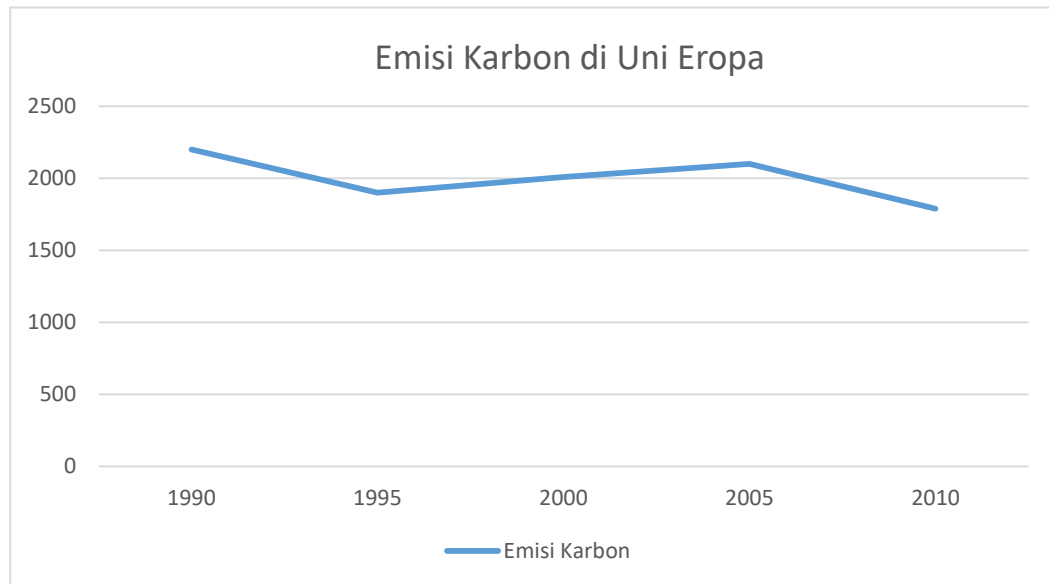
Pendahuluan

Konvensi internasional tentang perubahan iklim UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) atau biasa dikenal dengan protokol Kyoto merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur mengenai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca, konvensi ini disepakati oleh 181 negara pada tahun 1997 (UNFCCC, 2015). Mekanisme ini menyepakati tiga mekanisme yang digunakan untuk menurunkan konsentrasi gas rumah kaca, dimana pada masa revolusi industri ke empat pada tahun 1990 telah mendorong tingkat produksi yang tinggi di negara – negara industri sehingga tingkat konsentrasi gas rumah kaca menjadi tinggi, mekanisme yang disepakati antara lain *Joint Implementation (JI)* , *Clean Development Mechanism (CDM)* , dan *International Carbon Trading (ICT)* (UNFCCC, 2015).

Negara – negara Uni Eropa kemudian menyepakati untuk mengadopsi mekanisme *International Carbon Trading* sebagai mekanisme penurunan emisi karbon, pada tahun 2003 pemerintahan Uni Eropa mengeluarkan direktif pembentukan *European Union Emission Trading Scheme* (EU ETS) dan EU ETS mulai aktif beroperasi pada tahun 2005 (European Court Auditor, 2015:29). Rezim EU ETS telah mengalami tiga fase semenjak terbentuknya pada tahun 2005, fase pertama dimulai pada tahun 2005 – 2008 , fase kedua dimulai pada tahun 2009 – 2012 , dan fase ketiga 2013 – sekarang (European Court Auditor, 2015:27). Dalam

setiap fase EU ETS mengalami banyak perubahan dalam hal regulasi dan target yang harus dicapai, dan hal ini kemudian berbanding lurus dengan menurunnya tingkat emisi di negara – negara Uni Eropa.

Grafik 1. Tingkat Emisi Karbon di Uni Eropa (dalam juta ton)



Diolah dari : European Defense Funds on European Union Emission Trading Scheme Report in 2015

Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa semenjak adanya EU ETS pada tahun 2005 tingkat emisi karbon bisa terus dikurangi hingga mencapai titik terendah setelah revolusi industri ke empat pada tahun 1990. Namun disamping keberhasilan rezim EU ETS dalam menurunkan emisi karbon negara – negara Eropa juga mengalami kegagalan – kegagalan dalam mengatasi *fraud*, terutama *carousel fraud*. *Carousel fraud* merupakan sebuah perilaku *fraud* yang umum terjadi dalam skema perdagangan apapun di Uni Eropa (EUROPOL , 2010). *Carousel fraud* merupakan kejahatan keuangan yang mengambil manfaat dari penggelapan pajak nilai tambah yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah setempat, namun oleh pelaku kejahatan *carousel fraud* atau disebut dengan *Missing Trader Intra Community* (MTIC)¹ membawa lari pajak nilai tambah yang seharusnya disetorkan kepada otoritas yang berwenang (EUROPOL , 2010). Kerugian dari kejahatan *carousel fraud* ini sangat tinggi dimana pada tahun 2011 kerugian untuk *carousel fraud* di skema perdagangan karbon saja mencapai 5 miliar Euro (Jernej Podlipnik , 2012: 62). Menyikapi hal tersebut komisi Uni Eropa pada tahun 2011 merekomendasikan kepada negara – negara anggota EU ETS untuk mengadopsi mekanisme pajak “*reverse charged mechanism*” dalam sistem pajak mereka, menurut hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Jernej Podlipnik , Maria Berritella apabila negara mengimplementasikan sistem “*reverse charged mechanism*” maka resiko kejahatan “*carousel fraud*” akan berkurang hingga nol persen (Maria Berritella , 2012:92) .

Namun meski sudah diberi rekomendasi oleh komisi Uni Eropa yang mewajibkan negara anggota EU ETS untuk mengadopsi mekanisme “*reverse charged mechanism*” masih

¹ Missing trader intra community (MTIC), menurut Europol merupakan kelompok kriminal terorganisir, yang melakukan tindak kejahatan keuangan, dalam sebuah komoditas pasar yang sifatnya multinasional (Europol, 2010).

ada 6 negara anggota EU ETS yang menolak mengimplementasikan mekanisme ini dalam sistem pajak mereka 6 negara tersebut adalah ; Estonia, Cyprus, Lithuania, Malta, Bulgaria, dan Latvia (Carbon Market Institute , 2011:54). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data dari sumber sekunder (jurnal, laporan, buku dan berita). Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “mengapa ada negara anggota rezim *European Union Emission Trading Scheme* (EU ETS) yang tidak mematuhi rekomendasi dari rezim EU ETS”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa tidak ada titik temu antar negara Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan *carousel fraud* yang sudah lama terjadi di Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional milik Stephen Haggard dan teori compliance milik Ronald B Mitchell.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa tidak ada titik temu antar negara EU ETS dalam menghadapi “*carousel fraud*”. Teori rezim internasional dari Stephen Haggard menawarkan empat pendekatan dalam menganalisa kekuatan sebuah rezim, pendekatan pertama adalah “*strenght*” (kekuatan) berhubungan kuat dengan tingkat “*compliance*” negara anggotanya, dimana semakin kuat tingkat “*compliance*” negara anggotanya maka rezim tersebut semakin kuat, begitu juga sebaliknya, kemudian pendekatan “*organizational form*” atau bentuk organisasi apakah rezim tersebut sifatnya sentralisasi atau desentralisasi, bentuk rezim sangat mempengaruhi kekuatan sebuah rezim, pendekatan “*allocational mode*” menganalisa apakah mode alokasi dalam rezim tersebut terpusat kepada rezim/state atau kepada aktor diluar state/rezim dan yang terakhir adalah pendekatan “*scope*” dimana perubahan jangkauan rezim akan mempengaruhi kekuatan sebuah rezim (Stephen Haggard , 1987).

Teori compliance milik Mitchell juga akan digunakan sebagai pendukung analisa *strenght* dari pendekatan rezim internasional, teori compliance ini menganalisa mengapa sebuah negara kemudian patuh atau tidak patuh terhadap sebuah perjanjian atau rezim internasional (Ronald B Mitchell , 1996:11). Berdasarkan data dan temuan – temuan penulis di lapangan penulis memiliki tesis bahwa ternyata rezim EU ETS lebih fokus kepada upaya penurunan emisi ketimbang menyelesaikan permasalahan “*fraud*” yang terjadi di EU ETS, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya volume perdagangan sertifikat emisi karbon dari waktu ke waktu hal tersebut merupakan pertanda bahwa emisi karbon dapat ditekan dengan maksimal karena volume perdagangan sertifikat emisi terus meningkat, namun selama resiko fraud masih ada maka kerugian akibat “*carousel fraud*” akan semakin besar, karena semakin besar volume perdagangan dalam sebuah skema perdagangan maka potensi pajak nilai tambah yang ada semakin besar (Yannic Hullo , 2014:86).

Penulis melalui penelitian ini juga melakukan analisa terhadap serangkaian kebijakan yang diambil oleh EU ETS dari waktu ke waktu, setidaknya ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh EU ETS yang secara determinan berpengaruh terhadap kekuatan rezim internasional. Kebijakan yang pertama adalah penggantian metode *National Allocation Plan* (NAP) dalam menetapkan kuota emisi tiap entitas pembangkit energi dengan *EU-wide cap*. (Enviromental Defense Fund, 2015). Metode NAP yang memungkinkan setiap member states mendaftarkan kuota emisi tiap entitas pembangkit energi diwilayahnya, metode NAP pada fase ketiga (2012 – 2020) digantikan dengan metode *EU-wide cap* yang tersentral langsung dibawah komisi Uni Eropa. Dengan adanya metode baru tersebut negara tidak lagi berwenang untuk mendaftarkan *cap* tiap entitas pembangkit energi yang terdaftar namun pendaftaran tersebut langsung ditangani secara independen oleh Komisi Uni Eropa.

Kebijakan yang kedua adalah pembatasan *free allocation allowances* , pembatasan *allowances* yang dibagikan secara gratis menjadikan andil negara dalam pasar karbon EU ETS semakin kecil. Pasalnya distribusi *auctioned allowances* atau *allowances* yang diperoleh

dengan lelang langsung ditangani oleh komisi Uni Eropa. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan perubahan metode NAP menjadi *EU-wide cap* dimana sebagian kewenangan negara terkikis oleh rezim. Kebijakan yang diambil oleh EU ETS semakin lama semakin menegaskan kewenangan rezim yang semakin kuat sementara kewenangan negara semakin melemah.

Menurut pendekatan *strenght* faktor *compliance* member states mempengaruhi kekuatan sebuah rezim. Namun tidak menutup kemungkinan dengan terbatasnya peran negara juga akan mempengaruhi kekuatan rezim. Pasca keluarnya dua kebijakan tersebut, negara tidak punya lagi kontrol untuk mengatur pembagian *allowance* tiap entitas pembangkit energi di negaranya. Hal ini menjadikan peran negara hanya sebagai pengawas atas regulasi yang dikeluarkan oleh EU ETS. Untuk mendukung analisa pendekatan “*strenght*” penulis menggunakan teori “*compliance*” untuk menganalisa mengapa 6 negara EU ETS menolak rekomendasi dari komisi Uni Eropa. Kesimpulan dari penelitian ini tetap mengacu kepada analisa rezim internasional, analisa “*compliance*” ini merupakan analisa pendukung dari pendekatan “*strenght*” teori rezim internasional.

Namun sebelum masuk kepada analisa *non-compliance* negara yang menolak melakukan implementasi terhadap mekanisme *reverse charged mechanism* perlu adanya penjelasan mengenai beberapa contoh konkrit dari kasus *carousel fraud* yang ada di skema EU ETS. Dengan penjelasan mengenai kasus *carousel fraud* dan contohnya maka akan ditemukan celah mengapa kejahatan *carousel fraud* bisa terjadi.

Skandal Royal Bank Scotland

Royal Bank Scotland Scandal merupakan salah satu skandal terbesar dalam *carousel fraud* di skema perdagangan karbon EU ETS, dimana Royal Bank milik Skotlandia ini menggelapkan pajak nilai tambah senilai 145 Juta euro (This Is Money, 2016). Bank asal Skotlandia tersebut pada tahun 2009 membantu para *fraudster* dalam usaha penggelapan pajak dengan berbagai upaya manipulasi yang merugikan pemerintah Inggris sebesar 145 Juta Euro (This Is Money, 2016). Skandal ini melibatkan dua orang dalam dari Royal Bank Scotland dalam transaksi emisi karbon yang diimpor dari Prancis untuk kemudian didistribusikan kembali di Inggris.

Citibank Carbon Tax Scandal

Skandal yang melibatkan pihak Citibank ini terjadi di Inggris, dimana sekitar 10 Juta Poundsterling pajak hasil perdagangan karbon yang harusnya disetor kepada pemerintah Inggris digelapkan (Carbon Pulse, 2017). Walaupun perkara masih disidangkan, tuduhan HMRC selaku badan bea cukai di Inggris memiliki bukti kuat keterlibatan Citibank dalam skandal penggelapan pajak ini, dimana Citibank terindikasi melakukan pembiaran terhadap transaksi yang dicurigai sebagai transaksi fraud (Carbon Pulse, 2017).

Skandal Penggelapan Pajak dan Peran Negara dalam Pengawasan

Dua skandal besar tersebut menunjukkan keterlibatan Perbankan memiliki peran yang besar dalam pengawasan transaksi keuangan. Sebagaimana kita ketahui Royal Bank of Scotland adalah Bank milik Skotlandia sedangkan Citibank adalah Bank milik Amerika. Dalam teori *compliance* milik mitchell, negara bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh entitas dalam negara tersebut, termasuk perbankan. Skotlandia dan Amerika bukanlah negara anggota EU ETS, namun perbankan milik mereka beroperasi di banyak negara termasuk Inggris. Sebagai MNC Royal Bank of Scotland dan Citibank harus tunduk kepada aturan dan regulasi yang berlaku di Inggris. Apabila tidak maka menurut Mitchell tindakan entitas diluar negara yang merugikan termasuk kedalam *non-compliance* as

inadvertance, dimana negara tidak bisa mengontrol aktor – aktor yang berada dibawah naungannya.

Terjadinya *carousel fraud* dinegara yang sudah memiliki sistem pajak yang baik sesuai yang direkomendasikan oleh Komisi Uni Eropa yakni sistem *reverse charged mechanism* disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengatur entitas yang berada dibawah naungannya. Terlebih MNC dimana selain bertanggung jawab kepada Home Country, MNC juga harus tunduk kepada aturan di Host Country. Keterlibatan banyak aktor sub-nasional menjadi kelemahan tersendiri dalam rezim EU ETS, diamana semakin banyak aktor yang terlibat, semakin sulit untuk diatur. Sebagaimana kasus *carousel fraud* di Jerman yang melibatkan warga negara diluar Uni Eropa yakni warga Pakistan, dan keterlibatan MNC dalam kejahatan *carousel fraud* seperti yang terjadi di Inggris. Inggris dan Jerman sudah menerapkan rekomendasi sistem pajak yang diwajibkan oleh Komisi Uni Eropa, namun celah yang ada terletak didalam kemampuan negara dalam mengatur entitas yang ada dibawahnya. Sekalipun sistem sudah baik dan canggih pengawasan terhadap aktor dibawah negara harus diperketat untuk menghindari terjadinya *carousel fraud* dikemudian hari.

Analisis non compliance member state EU ETS yang menolak rekomendasi dari Komisi Uni Eropa

Compliance menjadi faktor yang determinan untuk menjadikan sebuah rezim internasional solid dan kuat. EU ETS yang dijalankan oleh supranasional Uni Eropa mempunyai kewenangan untuk memaksa negara tunduk terhadap direktif-direktif yang sudah dilegislati oleh parlemen Uni Eropa ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa. Kebijakan Komisi Uni Eropa yang memerintahkan kepada member states EU ETS merupakan kebijakan yang memiliki urgensi, ketika direkomendasikan pada tahun 2011 *tax fraud* di pasar EU ETS sedang mengalami peningkatan yang tinggi, sehingga komisi Uni Eropa menyurati enam negara EU ETS yang menolak untuk mengimplementasikan kebijakan *Reverse Charged Mechanism* pada skema perdagangan karbon EU ETS.

Menurut data dan temuan penulis selama penelitian sikap *non-compliance* yang dilakukan oleh Cyprus dan Lithuania mmbawa dampak secara langsung terhadap terjadinya *carousel fraud* dalam skema perdagangan karbon EU ETS. Cyprus dan Lithuania mendapat reputasi yang buruk dalam sistem perbankan oleh Uni Eropa, Cyprus dan Lithuania disebut sebagai surga bagi para pencuci uang. Pembahasan mengenai analisa *compliance* Cyprus dan Lithuania dijadikan satu pembahasan dikarenakan kedua negara tersebut menjadi sumber dari *tax fraud* yang ada di Uni Eropa karena lemahnya sistem hukum mengenai pencegahan tax fraud.

Dalam pasar karbon sendiri, Cyprus dan Lithuania menjadi arena bagi *fraudster* untuk melakukan *tax fraud* dalam skema perdagangan karbon EU ETS, dimana pada tahun 2015 para *fraudster* berhasil mengambil keuntungan sebesar 283 Juta euro hasil penggelapan pajak nilai tambah yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Prancis, kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan akun bank dari Cyprus dan Lithuania (EURACTIV, 2016).

Dalam mekanisme *Reverse Charged Mechanism* kewajiban atas pembayaran VAT terbit ketika transaksi mulai didebit dalam akun bank pihak yang bertransaksi (Taxguru, 2017). Oleh karena itu pihak bank menjadi pihak yang terdepan dalam pencegahan VAT fraud, dengan transparansi terkait transaksi yang terjadi dalam sistem perbankan miliknya. Sehingga apabila Cyprus dan Lithuania menerapkan mekanisme *Reverse charged mechanism* maka sistem pajak dan akun bank yang terdaftar dalam skema pasar EU ETS maupun skema pasar komoditas lain yang menerapkan mekanisme *Reverse Charged Mechanism* akan terhubung.

Cyprus dan Lithuania dikenal sebagai negara surga pajak, dimana kedua negara tersebut menerapkan pajak yang rendah untuk investor dari luar negeri (Tax Justice, 2017).

Hal ini mengakibatkan banyak investor menaruh uangnya dalam bank – bank yang ada di Cyprus maupun Lithuania. Resiko yang akan dihadapi oleh Cyprus dan Lithuania apabila menerapkan mekanisme *Reverse Charged Mechanism* adalah terhubungnya sistem EU ETS yang tersentral dengan perbankan domestik, hal tersebut membawa implikasi adanya kemungkinan *Rush* , karena banyak penghindar pajak menggunakan akun bank dari Cyprus dan Lithuania untuk bertransaksi dalam skema pasar EU ETS, Prancis menjadi contoh negara yang mengalami kerugian akibat *tax fraud* karena banyak akun dari Cyprus dan Lithuania bertransaksi tanpa membayarkan pajak nilai tambah (EURACTIV, 2016).

Dalam kasus *Carousel fraud* di Jerman yang disidangkan pada tahun 2017 pegawai bank Jerman banyak terlibat dalam upaya penggelapan pajak ini, sekalipun sistem pajak di Jerman sudah menggunakan mekanisme *reverse charged mechanism*. Kasus Jerman tersebut menunjukkan bahwa sistem pajak yang baik saja tidak menjamin Jerman bebas dari *carousel fraud* dikarenakan ulah sebagian oknum, apalagi bila sistem pajak dan hukum yang tidak transparan seperti di Cyprus dan Lithuania.

Ketidakpatuhan Cyprus dan Lithuania bisa dikategorikan sebagai *Non-compliance as preference* , dimana Cyprus dan Lithuania menghimpun dana dari luar negeri melalui bank – bank didalamnya dengan tawaran pajak investasi yang rendah dan kerahasiaan akun dalam melakukan transaksi. Cyprus dan Lithuania mengambil manfaat dari adanya EU ETS dengan mengambil keuntungan melalui investasi yang masuk dari luar negeri untuk bertransaksi dalam skema pasar karbon EU ETS. Apabila Cyprus dan Lithuania mengadopsi sistem *Reverse Charged Mechanism* resiko *rush* yang dihadapi perbankan kedua negara tersebut sangat tinggi.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada negara yang diatas kertas mematuhi ketentuan dari Komisi Uni Eropa namun gagal dalam mengawasi aktor sub-nasional di wilayahnya, sehingga menjadi celah untuk terjadi fraud. Contohnya adalah *carousel fraud* yang ditimbulkan akibat kelalaian negara yang mengawasi atau disebut oleh Mitchell sebagai *non-compliance as inadvertence* adalah skandal Royal Bank Scotland dan skandal City Bank yang terjadi di Inggris, dimana para aktor yang terlibat adalah otoritas perbankan dan sejumlah aktor sub-nasional yang berasal dari Pakistan dan Jerman. Sementara contoh dari *carousel fraud* yang ditimbulkan dari *non-compliance as preference* atau ketidakpatuhan negara dikarenakan benturan dengan kepentingan nasionalnya adalah *carousel fraud* yang menyerang Prancis pada tahun 2015 dengan melibatkan sejumlah perbankan dari Cyprus dan Lithuania. Cyprus dan Lithuania memang tidak menerapkan standar aturan yang ditetapkan oleh EU ETS untuk tindakan pencegahan *carousel fraud* dikarenakan Cyprus dan Lithuania menolak transparansi dalam transaksi perdagangan karbon EU ETS, dikarenakan tujuan dari Cyprus dan Lithuania adalah untuk menarik investor sebanyak – banyaknya dari luar negeri untuk menyimpan uang dalam bank – bank yang ada di Cyprus dan Lithuania. Benturan kepentingan ini kemudian menimbulkan celah untuk terjadi *carousel fraud* dalam skema perdagangan karbon EU ETS.

Pada intinya kedua jenis *non-compliance* tersebut berakibat kepada kelalaian negara dalam mengawasi aktor – aktor yang berada dibawah naungannya. Namun ada negara yang memiliki *will* untuk memberantas *carousel fraud* karena memang kejahatan tersebut merugikan negaranya sangat besar. Inggris misalnya, dimana kerugian yang dialami Inggris akibat *carousel fraud* ini menjadi salah satu yang terbesar dalam skema perdagangan karbon EU ETS. Komitmen Inggris dibuktikan dengan sikap Inggris untuk *comply* terhadap rekomendasi kebijakan dari Komisi Uni Eropa yang diwajibkan untuk seluruh negara EU ETS. Namun peran negara dalam pengawasan terhadap aktor didalamnya kurang, sehingga celah *carousel fraud* dapat timbul karena ulah sebagian aktor dalam negara tersebut.

Sementara untuk non-compliance tipe kedua memang negara – negara tersebut tidak memiliki *will* untuk mematuhi rekomendasi dari Komisi Uni Eropa, sehingga ketiadaan regulasi menjadi celah lebar untuk melakukan *carousel fraud*.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perubahan dalam rezim EU ETS mendorong perilaku negara untuk bersikap tidak patuh terhadap rezim EU ETS. Dimana perluasan peran rezim dan jangkauan rezim menyebabkan benturan dengan kepentingan nasional. Sehingga menjadi tidak patuh terhadap EU ETS adalah merupakan pilihan bagi negara tersebut untuk menyelamatkan kepentingan nasionalnya. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini menjadi terjawab, dimana ada negara yang tidak mematuhi rezim EU ETS karena terjadi benturan dengan kepentingan nasionalnya.

Referensi

- Berittela, M. (2012). The Carousel Value Added Tax Fraud in the European Emission Trading System. *Climate change and Sustainable Development Series*, 1-25.
- Carbon Pulse. (2017, January 27). *Carbon Pulse*. Diakses pada 1 Agustus 2018 dari : News and intelligence on carbon markets, greenhouse gas pricing and climate policy: <https://carbon-pulse.com/29736/>
- Carbon Expert. (2016, February 8). *Carbon Expert*. Diakses pada 24 Juli 2018 dari: <http://carbonexpert.ro/en/co2-emissions/what-are-co2-emissions-allowances/>
- Carbon Market Data. (2013, March 21). *Carbon Market Data*, Diakses pada 23 Juni 2018 dari : <https://www.carbonmarketdata.com/en/products/eu-ets-companies-database/functionalities>
- Central Intelligence Agency. (2016). *The World Factbook*. Washington: CIA
- Day, J. (2010, April 13). *Lexology*. Diakses pada 29 September 2017 dari: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4de1a23c-e9e2-48a1-81bf-f997104ba098>
- Directorate-General for Taxation and Customs Union (European Commission). (2016). Potential Distorting Resulting From Member States Practice. In D.-G. f. Commission), *Tax Treatment of EU ETS* (pp. 6-12). Brussel: EU Publications.
- EURACTIV. (2010, May 14). *EURACTIV*. Diakses pada 17 Juni 2018: <https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/bulgaria-suspended-from-co2-emissions-trading/>
- EURACTIV. (2016, MAY 25). *EURACTIV*. Diakses pada 19 Juni 2018: <https://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/eu-carbon-market-fraudsters-face-heavy-jail-sentences/>
- Ecometrica. (2010). *Introduction of Aviation into the EU ETS*. Boston: Ecometrica.
- Environmental Defense Fund. (2015). *The World's Carbon Markets: A Case Study Guide to Emissions Trading*. Brussel: CDS Climate research.
- European Commission. (2013). *The EU Emissions Trading System (EU ETS)*. Brussel: European Union Publication Office.
- European Commission Climate Action. (24 Maret 2013). *European Commission*. Diakses pada 27 September 2017 dari: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_en
- European Commission Directorate-General Environment . (2015). *Interactions of the EU ETS with Green And White Certificate Schemes*. London: Nera.
- European Court of Auditor. (2015). *The Integrity and Implementation of EU ETS*. Luxemburg: European Union.
- EUROPOL. (2012, March 11). *European Police*. Diakses pada 23 Januari 2018 dari: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud>
- ERR News. (2017, April 17). *ERR.EE*. Diakses pada 17 Juni 2018 dari : www.news.err.ee

- Estonica. (2017, Mei 21). *estonica*. Diakses pada 25 Juli 2018 dari: www.estonica.org
- Europages. (2016, Januari 22). *Europages*. Diakses pada 2 Juli 2018 dari: www.europages.co.uk
- GLOBAL TAX NEWS. (2011, Agustus 11). *TAX-NEWS*. Diakses pada 28 Juli 2018 dari: www.taxnews.com/News/Estonia_Rejects_Reverse_Charged_Mechanism_50723.html
- Halls, S. (2011, May 31). *S&P Global Platts*. Retrieved from www.platts.com: <https://www.platts.com/latest-news/electric-power/brussels/european-regulators-want-reverse-charge-vat-on-8936550>
- Hulot, Y. (2014, oktober 13). *Risk Compliance*. Retrieved from News: www.riskcompliance.biz/news/in-belgium-hybrid-fraud-detection-helps-independent. (Malta Reststs EU's Shipping, aviation emission cuts). 2009. canberra: independent.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- International Emission Trading Association. (2015). *The EU's Emission Trading System*. Geneva: IETA.
- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory an overview. *Improving Compliance with international environmental law*, 1-16.
- Podlipnik, J. (2012). MISSING TRADER INTRA-COMMUNITY AND CAROUSEL VAT FRAUDS . *ECJ AND ECHR CASE LAW* , 457-483.
- Rachmawati. (2012). *Memahami perkembangan studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sugiyono. (2002). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Simpson, S. H. (1987). International Organization. *Theori of International Regimes*, 491-517.
- Taxguru. (2017, Mei 21). *taxguru*. Diakses pada 15 Januari 2018 dari : <https://taxguru.in/goods-and-service-tax/reverse-charge-mechanism-gst.html>
- Tax Justice. (2017, oktober 26). *tax justice*. Diakses pada 26 Januari 2018 dari : <https://www.taxjustice.net/2017/10/26/21561/>
- Teffer, P. (2015, July 2). *euobserver*. Diakses Pada 2 Februari 2018 dari www.euobserver.com: <https://euobserver.com/economic/129433>
- The Guardian. (2009 , December 14). *The Guardian*. Diakses pada 2 Februari 2018 dari: <https://www.theguardian.com/business/2009/dec/14/eu-carbon-trading-fraud>
- This Is Money. (26 Juni 2016). *This in money*. Diakses pada 5 Juli 2018 dari : Financial News: <http://www.thisismoney.co.uk/money/markets/article-3625388/RBS-sued-145m-alleged-role-huge-carbon-trading-VAT-fraud.html>
- TRADING ECONOMICS. (2017, Agustus 11). *TRADING ECONOMICS*. Diakses pada 29 Juli 2018 dari : NEWS: www.tradingeconomics.com/european-union/gdp
- Transport and Environment. (2014, May 30). *Transport and Environment*. Diakses pada 29 Juli 2018 dari : News: <https://www.transportenvironment.org/news/netherlands-and-germany-fine-foreign-airlines-over-ets>.
- Tunistra W, R. W. (2005). *Aviation in the EU Emissions Trading Scheme*. Amsterdam: PBL Netherland Environmental Assesment Agency.
- UK and EU. (2014, March 22). *The UK in a Changing Europe*. Diunduh dari: www.ukandeu.ac.uk/fact-figures/what-are-eu-directives/